

DATA DESA PRESISI UNTUK PEMBANGUNAN DESA PRESISI

Sofyan Sjaf¹, Lukman Hakim², Ahmad Aulia Arsyad³

¹ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB University

² Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB University

³ Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), LPPM IPB University

ISU KUNCI

1. Kualitas data akan menentukan keberhasilan/kegagalan pembangunan desa.
2. Data presisi menentukan ketepatan perencanaan, implementasi, & monev pembangunan desa.
3. Data presisi mampu memotret potensi desa secara detail & kondisi aktual rumah tangga desa.
4. Data Desa Presisi mampu memastikan ukuran-ukuran pembangunan desa dengan tepat.
5. Pendekatan Data Desa Presisi menempatkan warga desa sebagai subjek dalam penyusunan & pengelolaan data desa

RINGKASAN

Data Desa Presisi merupakan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa (misal Perguruan Tinggi) dengan biaya yang relatif murah. Hal ini dilakukan untuk mencapai pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Dengan mempertimbangkan unsur efisien, efektif dan presisi, maka sudah saatnya dilakukan pembenahan data desa yang menitikberatkan relasi antara spasial, partisipasi, dan sensus. Ketiga relasi ini, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi kepada warga desa. Inilah keniscayaan yang menghasilkan data desa presisi.





PENDAHULUAN

Pembangunan desa memasuki era postmodern (postmodern). Era yang ditandai dengan masifnya kemajuan teknologi (era 4.0). Naik dan Bhide (2014) mengakui bahwa era 4.0 yang ditandai dengan keunggulan perangkat lunak dan algoritma yang cerdas, sebagai pilar dari otomatisasi dalam knowledge work.

Merespon kemajuan yang ada, kaum postmodern menganggap bahwa kemajuan teknologi ini akan mempermudah aksi pembangunan nantinya, namun sebaliknya. Teknologi menyimpan daya destruksi yang membuat aksi pembangunan terjebak ke dalam pasca kebenaran atau post-truth (Sjaf 2019). Sebagai entitas terpenting, bagaimana desa menghalau mewabahnya post-truth ini?

Melalui Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, adalah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik data dari level desa hingga pusat. Namun disayangkan, inisiatif ini tidak kunjung terealisasi dikarenakan beberapa sebab. Bisa jadi karena tidak didukung dengan konsep dan pendekatan inklusif dalam implementasinya. Atau bisa jadi masih ragu terhadap kemampuan warga desa untuk menghasilkan data yang memiliki tingkat keakuratan tinggi.

Walau saat ini sudah terdapat data Potensi Desa (Podes) yang memberikan gambaran utuh tentang desa-desa di Indonesia. Akan tetapi, apakah sudah tepat pendekatan pengumpulan data dan indikatornya? Disinilah titik kritisnya, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang mampu beradaptasi dengan era 4.0 dan memberdayakan warga desa dalam pengumpulan data.

Diakui, bahwa selama ini sumber data desa diperoleh dari Podes dan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel). Kedua data ini dirilis dari dua institusi pemerintah yang berbeda. Namun kenyataannya, kedua sumber data ini selalu saja membuat perdebatan yang tidak berujung. Sehingga jika saja pendekatan ini masih terus dipertahankan untuk merespon situasi dan kondisi yang ada, maka hasilnya akan selalu berbeda dengan kenyataan. Apalagi data ini terkesan sentralisme. Mengapa?

Pertama, baik Podes maupun Prodeskel menempatkan responden kepala desa atau aparat desa. Dalam konteks penggalan data Podes dan Prodeskel, responden yang merupakan target enumerator memiliki keterbatasan membaca desa secara utuh. Tidak itu saja, Podes dan Prodeskel memposisikan warga desa sebagai obyek pengambilan data; kedua, penggalan sumber data desa saat ini masih konvensional, minim partisipasi warga, dan tidak berbasis spasial; ketiga, sumber data desa masih bergantung dengan pendekatan top down. Desa belum memiliki kewenangan untuk mengonstruksi data desanya; dan keempat, baik Podes dan Prodeskel sebagai sumber data desa masih belum beradaptasi terhadap perkembangan era 4.0. Alhasil, ujung sumber data desa sebagai big data masih jauh dari yang diharapkan.

Keempat hal yang telah disebutkan tersebut adalah hambatan untuk menghasilkan sumber data desa yang presisi. Sehingga diperlukan pembenahan data desa melalui pendekatan baru yang melibatkan partisipasi warga sehingga polemik tentang data tidak selalu berulang.

Empat persoalan di atas, semakin mempertegas dibutuhkan pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan data desa presisi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Data desa yang presisi, akan mampu menghalau terjadinya konflik kepentingan dan dengan mudah digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kejadian apapun. Semua ini, tidak lain sebagai upaya untuk menghindari penggunaan asumsi, dugaan dan penyederhanaan masalah dalam menguraikan fakta. Oleh karena itulah, soal sumber data menjadi kebutuhan penting dan mendesak.

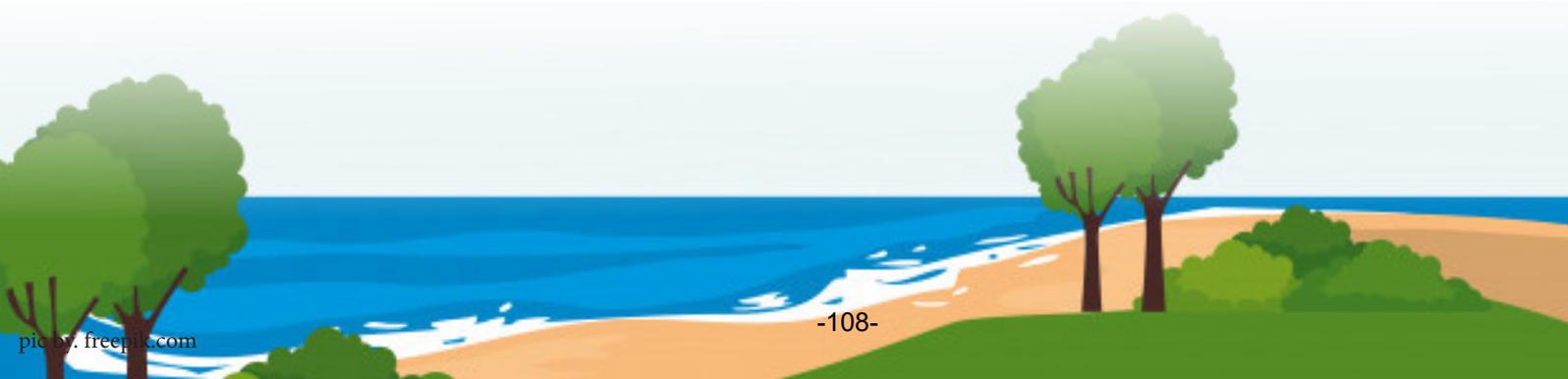
Sudah saatnya pembenahan data desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang menitikberatkan relasi antara spasial, partisipasi, dan sensus. Ketiga relasi ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi kepada warga desa. Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmu pengetahuan berbasis riset, teknologi, dan inovasi harus mampu menjembatani dan mendampingi warga desa dalam membangun data desa presisi. c Aspek kesejahteraan rakyat dapat dilihat dan diukur melalui 5 hal, yaitu: Sandang, Pangan, dan Papan; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesehatan, Pekerjaan, dan Jaminan Sosial; Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum dan HAM; serta Infastruktur dan Lingkungan Hidup.

Terdapat paling tidak 5 hal yang menyebabkan data desa presisi sangat dibutuhkan. Pertama, kualitas data (presisi/tidak presisi) akan menentukan keberhasilan/kegagalan pembangunan desa. Kedua, data presisi menentukan ketepatan perencanaan, implementasi, & monev pembangunan desa. Ketiga, data presisi mampu memotret potensi desa secara detail & kondisi aktual rumah tangga desa. Keempat, data desa presisi mampu memastikan ukuran-ukuran pembangunan desa dengan tepat. Kelima, pendekatan data desa presisi menempatkan warga desa sebagai subjek dalam penyusunan & pengelolaan data desa.

iii) untuk mendeskripsikan tujuan dari kajian atau penelitian yang dilakukan

Menurunnya angka kemiskinan, membaiknya infrastruktur desa, terbukanya akses informasi, pendapatan di atas rata-rata, dan kualitas sumberdaya manusia yang membaik adalah sederet ukuran yang menentukan perubahan status desa, dari tertinggal menjadi berkembang atau maju. Namun, tidak sedikit ukuran-ukuran tersebut dikritisi pegiat sosial dan warga desa sendiri. Alasannya cukup sederhana, dari mana diperoleh data tersebut? Sebab realitasnya, data yang tersaji tidak sebagaimana fakta di lapangan.

Respon kritis tersebut sangat wajar, karena warga desa selama ini tidak ikut terlibat menyusun data desa, apalagi memperbaharunya. Seolah data desa, hanya milik elit desa (kepala desa dan perangkatnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat/daerah). Sehingga warga desa merasa dijadikan sebagai obyek semata. Kondisi ini beralasan, karena sumber data desa yang dapat diakses publik masih merujuk Permendagri No. 32/2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua Permendagri tersebut, menghasilkan paling sedikit 33 model buku yang wajib dikuasai aparatur desa. Ini belum termasuk tambahan model pencatatan dan pelaporan lain. Selanjutnya, buku-buku ini dijadikan sebagai sumber informasi kepala desa atau aparatur desa ketika publik hendak mengaksesnya, termasuk sensus potensi desa di mana kepala desa atau aparatur desa menjadi responden dalam sensus tersebut. Banyaknya buku yang harus dilengkapi tersebut, membuat pemerintah desa gagal fokus dalam substansi. Sebaliknya, motif menggugurkan kewajiban dengan cara melengkapi dokumen (buku) menjadi utama. Sehingga metodologi penyusunan dokumen yang benar, sangat jauh dari harapan. Realita ini bisa kita temukan di hampir semua desa. iv) untuk memberikan ikhtisar (overview) tentang temuan atau kesimpulan dari kajian, dan/atau mendorong rasa keingintahuan pembaca untuk membaca di bagian selanjutnya dari policy brief yang ditulis.





Kehadiran UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan spirit dan momentum untuk menghadirkan data desa presisi. Setidaknya, hak rekognisi dan subsidiaritas desa dapat digunakan untuk merespon tujuh isu strategis yang membutuhkan data desa presisi. Adapun ketujuh isu strategis desa yang dimaksud, yaitu: (1) penataan desa; (2) perencanaan desa; (3) kerjasama desa; (4) investasi masuk desa; (5) BUM Desa/BUM Desa Bersama; (6) kejadian luar biasa dan (7) aset desa. Ketujuh isu strategis tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika berlandaskan data desa presisi.

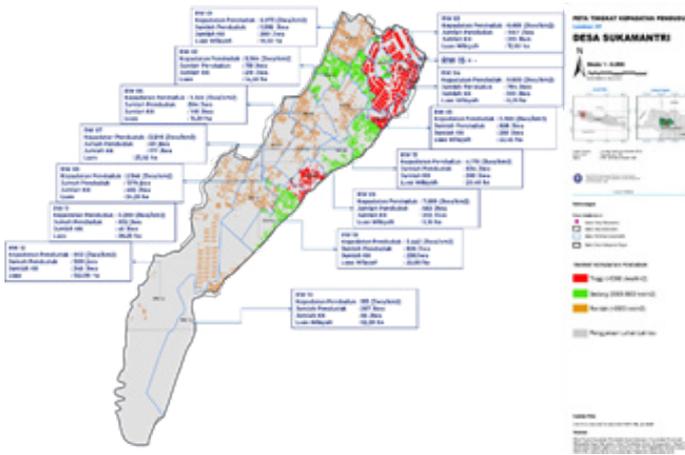
Efisien, efektif, dan presisi adalah tiga unsur penting yang dibutuhkan untuk menghasilkan sumber data desa yang menggambarkan secara aktual kondisi desa-desa di Indonesia. Efisien artinya pengambilan data tidak membutuhkan biaya besar; efektif artinya pengambilan, validasi, dan verifikasi data bisa dilakukan oleh warga desa dengan bantuan pihak luar desa (misal Perguruan Tinggi); dan presisi artinya data akurat dan tepat sebagaimana kondisi aktual di desa.

Dengan mempertimbangkan tiga unsur (efisien, efektif dan presisi), maka sudah saatnya dilakukan pembenahan data desa. Pembenahan dilakukan berupa pendekatan data desa yang menitikberatkan relasi antara spasial, partisipasi, dan sensus. Ketiga relasi ini, hanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi kepada warga desa. Inilah keniscayaan yang menghasilkan data desa presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kita memiliki Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai pijakan untuk mencegah terjadinya konflik data dari level desa hingga pusat. Namun, disayangkan kebijakan tersebut belum didukung dengan konsep dan pendekatan inklusif dalam implementasinya. Data potensi desa yang diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang desa-desa di Indonesia, ternyata jauh dari harapan. Hasil studi Sjaf, et. al. (2017) menunjukkan data potensi desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan untuk mengukur kemajuan desa masih jauh dari keakuratan. Dalam teknik pengumpulan data potensi desa tersebut, masih ditemukan beberapa persoalan terkait kaidah ilmiah menggali data desa yang memiliki tingkat akurasi tinggi (presisi) dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Belum lagi terkait updating (pembaruan) data yang masih jauh dari harapan.

Sebagian hasil riset dan aktivitas membangun data desa presisi di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dapat disimak sebagai berikut

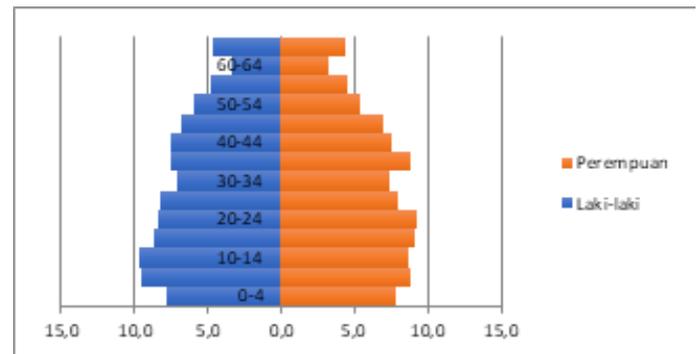


Gambar 1. Sebaran penduduk Desa Sukamantri

Desa Sukamantri merupakan desa semi-urban yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Sukamantri memiliki 15 Rukun Warga (RW) yang berbatasan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Tamansari. Hasil sensus dengan menggunakan MERDESA Aplikasi menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Sukamantri sebanyak 3.461 KK dan 12.009 jiwa penduduk yang tersebar di 14 Rukun Warga (RW) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.571 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk dikluster menjadi tiga bagian, yakni:

1. wilayah yang berwarna merah menunjukkan RW yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Adapun RW yang dimaksud adalah RW 01 dengan kepadatan penduduk sebesar 5.180 jiwa/km², diikuti RW 04 sebesar 9.454 jiwa/km² dan RW 09 sebesar 7.459 jiwa/km². RW-RW yang memiliki kepadatan penduduk tinggi ini merupakan pusat pemukiman;
2. wilayah yang berwarna hijau menunjukkan RW yang memiliki tingkat kepadatan penduduk sedang. Rukun Warga (RW) yang masuk dalam kategori ini adalah RW 02 dengan kepadatan penduduk sebesar 5.180 jiwa/km², RW 03 sebesar 6.712 jiwa/km², RW 08 sebesar 5.684 jiwa/km² dan RW 10 sebesar 3.470 jiwa/km²;

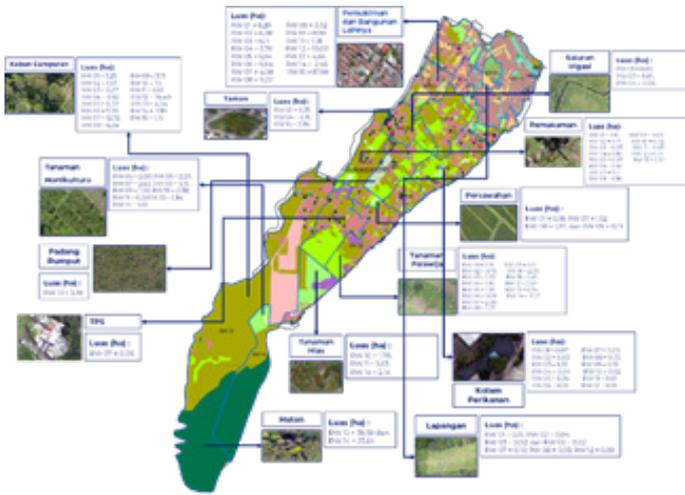
3. wilayah yang berwarna coklat menunjukkan RW yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Adapun RW yang masuk dalam kategori ini sebanyak tujuh RW, meliputi: RW 05 (3.822 jiwa/km²), RW 06 (3.274 jiwa/km²), RW 07 (2.554 jiwa/km²), RW 11 (3.169 jiwa/km²), RW 12 (802 jiwa/km²), RW 13 (4.088 jiwa/km²) dan RW 14 (511 jiwa/km²).



Gambar 2. Piramida penduduk Desa Sukamantri

Dari struktur piramida penduduk Desa Sukamantri pada gambar 2 memperlihatkan struktur umur 10 – 14 tahun paling tinggi dengan jumlah penduduk 1.100 jiwa. Kemudian, disusul oleh struktur umur 05 – 10 dan 15 – 19 masing – masing sebesar 1.097 jiwa dan 1.969 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia lanjut 60 – 64 sebanyak 394 jiwa dan di atas 65 sebesar 534 jiwa. Mengacu pada data ini maka rasio beban tanggungan di Desa sukamantri adalah 44 yaitu dimana setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 44 orang usia non produktif.

Gambar 3 memperlihatkan peta penggunaan lahan Desa Sukamantri yang terdiri dari pemukiman, kebun campuran, tanaman hortikultura, padang rumput, tanaman palawija, saluran irigas, persawahan, hutan, kolam ikan, taman, dan tanaman hias. Dari penggunaan lahan ini, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Sukamantri merupakan wilayah pemukiman dan kebun campuran. Terkhusus pada RW 12 dan RW 14 masih dikelilingi hutan. Di RW 12 juga termasuk wilayah memiliki kebun campuran terluas sebesar 74,49 ha. Setelah itu, diikuti RW 05 11,37 ha. Sementara, di wilayah RW 13 ditumbuhi padang rumput seluas 3,39 ha lebih luas lahan dari lahan sawah yang tersebar di empat RW 1,7,8, dan 9. Total secara keseluruhan luas lahan sawah sebesar 2,8 ha.



Gambar3. Penggunaan lahan wilayah Desa

Berdasarkan hasil kompilasi antara data spasial dengan data sensus yang melibatkan partisipasi warga, dapat dilihat bahwa Data desa presisi hadir memberikan kesadaran sekaligus aksi partisipasi untuk menuju ke arah yang benar untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan.

Menjelaskan tentang isu tersebut dan relevansinya terhadap kebijakan

Desa harus diperkuat dengan data desa presisi, sebab desa adalah jantung pertahanan pembangunan nasional. Slogan Presiden Ir. Jokowi tentang “membangun desa, berarti membangun Indonesia” adalah slogan yang sudah tepat. Indonesia dibangun dari himpunan desa dan kelurahan. Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai 83.931 (BPS, 2018), sehingga ketika pemerintah memprioritaskan pembangunan di desa, maka berarti pembangunan nasional di seluruh Indonesia. Tetapi, perlu diingat bahwa pembangunan baik itu infrastruktur, ekonomi maupun sumberdaya manusia sejatinya membutuhkan perencanaan yang berlandaskan data presisi. Dalam ilmu manajemen dikenal perencanaan yang baik adalah yang berlandaskan data. Namun, realitas yang terjadi di desa, pembangunan berlangsung secara tidak terukur yang berakibat terhadap buruknya kualitas perencanaan pembangunan desa.

Tentunya muara dari uraian di atas, berdampak pada tidak tercapainya target dari pembangunan desa (loss target) yang jauh dari sasaran yang ingin dituju. Sjaf (2019) mengungkapkan beberapa penyebab masalah data desa yang ada saat ini, yaitu: (1) data dibangun dengan menempatkan warga sebagai objek; (2) kurangnya kreativitas dalam pendekatan penyusunan dan pengelolaan data desa; (3) minimnya akses data (khususnya data desa berbasis spasial); (4) rendahnya SDM aparat desa (pengurus RT sampai dengan pengurus desa); dan (5) umumnya data desa disusun dan diolah secara manual.

Kelima masalah penyebab rendahnya ketersediaan data yang presisi di desa, tentunya harus disikapi pemerintah dengan merubah paradigma dalam membangun desa, yaitu membangun desa yang berlandaskan data presisi. Jika desa berhasil membangun data desa presisi, maka berarti Indonesia akan memiliki data presisi.

KESIMPULAN

Bagian kesimpulan menjawab dari permasalahan yang dikaji mengekspresikan ide melalui penggunaan pernyataan yang kuat dan seimbang serta dapat dipertahankan. Jika diperlukan dapat ditulis dalam bentuk pointer.

Data desa presisi hadir memberikan kesadaran sekaligus aksi partisipasi untuk menuju ke arah yang benar untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. Upaya untuk menyambungkan antara ketujuh isu strategis desa dengan data presisi, semuanya tidak lain untuk mengeliminasi munculnya data fiktif di desa. Dengan harapan pemerintah mau “berinvestasi” dalam pembangunan data desa presisi.

Peran data desa presisi dalam menjawab isu strategis pembangunan desa adalah:

1. Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas
2. Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan desa
3. Menyajikan potensi desa secara utuh; vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa, RPKP
4. Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan perdesaan, dan promosi desa
5. Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerjasama
6. Menyajikan potensi bencana desa, kerusakan ekosistem/ekologis
7. Menyajikan data posisi dan potensi aset, jumlah luasan serta peta sebaran aset dan pemanfaatannya



Pertama, pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang afirmatif untuk menghasilkan data desa presisi. Kepercayaan sepenuhnya kepada desa harus diberikan untuk memproduksi data desa presisi. Bukan sebaliknya menjadikan desa sebagai obyek data. Dana desa harus diorientasikan menghasilkan data desa presisi tersebut. Peran pemerintah sebatas mengeluarkan regulasi pemanfaatan dana desa untuk data desa presisi dan pedoman penyusunan data desa presisi (data tematik) yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pembangunan desa. Tentang hal ini, maka perlu revisi Permendagri No. 32/2006 dan Permendagri No. 113/2014.

Kedua, era 4.0 harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempermudah aksi pembangunan desa. Pemerintah harus menyediakan server di kabupaten untuk menampung data-data yang diproduksi desa. Kecamatan harus menjadi penjamin mutu kualitas data yang diproduksi desa. Data yang terkumpul (big data) dijadikan basis pijakan musyawarah dari tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat yang berujung sebagai kebijakan pembangunan nasional yang presisi.

Ketiga, memberikan peran kepada perguruan tinggi atau elemen pegiat sosial untuk melakukan pendampingan metodologi ke desa-desa. Keterbatasan sumberdaya desa menuntut peran perguruan tinggi atau pegiat sosial untuk melakukan edukasi metodologi. Data dengan metodologi yang benar, akan mempermudah kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Ke depan, bisa jadi kebijakan satu peta dan kebijakan satu data berawal dari desa; dan keempat, membangun sistem kerahasiaan data desa. Dibantu dengan pakar digital, pemerintah sudah saatnya mulai memikirkan sistem kerahasiaan data desa.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bagian Implikasi berisi tentang kemungkinan konsekuensi dari hasil kajian terhadap perubahan kebijakan. Pernyataan implikasi umumnya bersifat kurang langsung dibandingkan rekomendasi.

Rekomendasi menjelaskan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, memberikan saran berupa langkah-langkah tepat yang harus dilakukan. Penulis harus memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bersifat sangat relevan, kredibel dan layak untuk ditindaklanjuti.

Data desa presisi adalah data yang bersumber dari desa yang dihasilkan melalui pendekatan spasial, partisipatif, dan sensus. Penggunaan teknologi drone dan digital, serta pendampingan metodologi adalah keniscayaan menghasilkan data desa presisi. Pertanyaannya bagaimana upaya memproduksi data desa presisi untuk menepis kebohongan pembangunan desa?

Daftar Pustaka

Gauri Naik dan Sanika S. Bhide, 2014. Will the Future of Knowledge Work Automation Transform Personalized Medicine? *Applied & Translational Genomics* 3 (3): 50-53.

Sjaf, S. 2019. *Post-Truth dan Kebutuhan Data Desa Presisi*. Bogor (ID): PSP3 IPB University.

Sjaf, S. 2019. *Data Desa: Perlu Pendekatan Baru!*. Bogor (ID): PSP3 IPB University.

Sjaf, S. Sarwoprasodjo, S. 2017. *Laporan Akhir Pemetaan Desa Secara Partisipatif Berbasis Drone Desa, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Penelitian Strategis Unggulan*. Bogor : Institut pertanian bogor

Policy Brief merupakan insentif Policy Brief

Penulis:

1. Sofyan Sjaf (Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA University, sofyansjaf@apps.ipb.ac.id)
2. Lukman Hakim2 (Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, FEMA IPB University, lukmanhakim@apps.ipb.ac.id)
3. Ahmad Aulia Arsyad (Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), LPPM IPB University, ahmadauliaarsyad@gmail.com)

Penyunting:
Eva Anggraini
Akhmad Faqih

Tata Letak:
Retia Revany